

DAMPAK KEMANDIRIAN FISKAL DAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KESEJAHTERAAN DI INDONESIA



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

Ferensky Regina Sandjaja

2016110053

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI**

PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/X/2013

BANDUNG

2020

**THE IMPACT OF FISCAL INDEPENDENCE AND
BUDGET EFFICIENCY ALLOCATION ON WELFARE IN
INDONESIA**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Economics

By

Ferensky Regina Sandjaja

2016110053

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS**
Accredited by BAN-PT No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/X/2013
**BANDUNG
2020**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN



**PERSETUJUAN DRAFT SKRIPSI
UNTUK DISIDANGKAN**

**Dampak Kemandirian Fiskal dan Efisiensi
Anggaran Terhadap Kesejahteraan di
Indonesia**

Oleh:

Ferensky Regina Sandjaja
2016110053

Bandung, Juni 2020

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

Pembimbing Skripsi,

Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Ferensky Regina Sandjaja
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Januari 1999
NPM : 2016110053
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

DAMPAK KEMANDIRIAN FISKAL DAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

dengan,

Pembimbing : Ivantia S. Mokoginta, Ph.D

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelamya.
Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 9 Juni 2020

Pembuat Pernyataan :



(Ferensky Regina Sandjaja)

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi tingkat kemandirian fiskal daerah dan sejauh mana anggaran pemerintah daerah digunakan secara efisien untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta bagaimana hubungan keduanya terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 29 provinsi dan 442 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2012-2017. Hasil dari penelitian adalah (1) Secara umum, tingkat kemandirian fiskal masih termasuk dalam kategori cukup dan kecil. (2) Secara keseluruhan tingkat efisiensi pada tahun 2012-2017 baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota masih rendah (inefisien). (3) Kemandirian fiskal, efisiensi anggaran di bidang pendidikan, dan kesehatan signifikan secara statistik berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Kata kunci: Kemandirian fiskal, efisiensi anggaran, kesejahteraan.

ABSTRACT

Fiscal decentralization initially aims to increase regional financial independence. The study aimed to identify the level of regional independence and identify which local government budgets are used for funding in education and health efficiently, also how they relate to the welfare in Indonesia. The data used in this study were balanced panel data of 29 provinces and 442 districts/cities in Indonesia from 2012-2017. The results of this study are (1) in general, the level of fiscal independence is included in the category of sufficient and small categories. (2) Overall, the level of efficiency in 2012-2017 both at the provincial and district/city levels is still low (inefficient). (3) Fiscal independence, budget efficiency in the field of education and health are statistically positive significant affect welfare at the provincial, district, and city levels.

Keywords: *Fiscal independence, budget efficiency allocation, welfare.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Sang Triratna, Para Buddha dan Bodhisattva, atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan di Indonesia. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dengan segala upaya, usaha, serta kemampuan, penulis berusaha menyusun skripsi ini agar dapat berguna bagi semua pihak.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi, banyak rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat dukungan, saran, dan doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, ayahanda tercinta Franky Mulijanti Martono dan Ibunda tersayang Ratnadewi selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dorongan, perhatian, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Terima kasih juga kepada Fannya Ratana Sandjaja dan Fioreinz Renata Sandjaja selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
2. Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D. selaku dosen pembimbing, dosen wali, dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang selalu dengan sabar memberikan banyak ilmu, masukan, arahan, waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Miryam B. L. Wijaya, Bapak Charvin Lim, S.E., M.Sc, Bapak Dr. Franciscus Haryanto selaku dan dosen bidang kajian EMK yang telah memberikan banyak pengetahuan, motivasi, pengalaman dan pembelajaran yang berharga selama masa perkuliahan
4. Seluruh dosen dan tutor Program Studi Ekonomi Pembangunan lainnya yang telah membagikan banyak ilmu kepada penulis. Semoga semua ilmu yang telah penulis peroleh dapat bermanfaat bagi kehidupan penulis di masa yang akan datang.
5. Kak Shafiah, terima kasih telah memberikan semangat, berbagi pengalaman, dan membantu penulis saat mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini.
6. Para sahabat-sahabat penulis: Nadia, Rina, Rere, Sabilla, Netha, Alya, Venny, Ditha, Nadhya, Dinda, Ferinda, Nia, Ita, Syafia, teima kasih banyak atas kebersamaan, pengalaman, canda, tawa, dan cerita

7. Keluarga Ekonomi Pembangunan Unpar 2016, terutama teman teman seperjuangan bidang kajian yaitu Garry, Algi, Michael, Raihan, Bene.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang ikut memberikan segala bantuan kepada penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, tiada hal yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini hingga bisa bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis ingin melimpahkan segala jasa kebajikan ini teriring doa, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta, Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia.

Bandung, 9 Juni 2020,

Ferensky Regina Sandjaja

DAFTAR ISI

ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran	3
2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Peran Pemerintah dalam Menyediakan Barang Publik.....	5
2.2 Desentralisasi Fiskal.....	7
2.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	10
2.4 Desentralisasi Fiskal, Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Kesejahteraan.....	12
3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	13
3.1 Metode penelitian	13
3.1.1 Jenis dan Sumber Data.....	13
3.1.2 Teknik Analisis.....	15
3.1.2.1 Pengukuran Desentralisasi Fiskal	15
3.1.2.2 Pengukuran Efisiensi Penggunaan Anggaran	16
3.1.2.3 Regresi Data Panel.....	19
3.2 Objek Penelitian.....	20
3.2.1 Penghasilan Asli Daerah (PAD).....	21
3.2.2 Total Pendapatan Daerah (TPD).....	22
3.2.3 Anggaran Belanja Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan ...	23
3.2.4 Rata- Rata Lama Sekolah (RLS).....	25
3.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH).....	27
3.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	27
4 HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF).....	28
4.2 Hasil Analisis DEA.....	30

4.2.1	Analisis <i>Time Series</i>	30
4.2.2	Analisis <i>Cross Section</i>	32
4.3	Hasil Regresi Data Panel	33
4.3.1	Uji Asumsi Klasik.....	33
4.3.1.1	Multikolinearitas	33
4.3.1.2	Uji Heteroskedastisitas	34
4.3.1.3	Hasil Estimasi Dengan <i>Common Effects Model</i> (CEM).....	35
4.3.2	Pembahasan	37
5	PENUTUP	38
5.1	Kesimpulan	38
5.2	Saran.....	39
	DAFTAR PUSTAKA	41
	LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Variabel.....	14
Tabel 2. Rata-rata Efisiensi Penggunaan Anggaran Berdasarkan Pulau.....	32
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Model 1	34
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Model 2	34
Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1	35
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2	35
Tabel 7. Hasil Regresi Provinsi	36
Tabel 8. Hasil Regresi Kabupaten/Kota.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	3
Gambar 2. Komposisi Pendapatan Asli Daerah	6
Gambar 3. Komposisi Dana Perimbangan	6
Gambar 4. Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7
Gambar 5. Rata-Rata DDF di Indonesia Tahun 2012-2017.....	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan PAD Tahun 2012-2017 di Indonesia.....	21
Grafik 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pulau Tahun 2012-2017 (ribu jiwa) .	22
Grafik 3. Perkembangan TPD Tahun 2012-2017 di Indonesia	22
Grafik 4. Anggaran Belanja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2012-2017 di Indonesia.....	24
Grafik 5. Anggaran Belanja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2012-2017 di Indonesia.....	25
Grafik 6. Perkembangan RLS Tahun 2012-2017 di Indonesia	26
Grafik 7. Perkembangan AHH Tahun 2012-2017 di Indonesia.....	27
Grafik 8. Perkembangan IPM Tahun 2012-2017 di Indonesia	28
Grafik 9. Rata-Rata Efisiensi Penggunaan Anggaran	30

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga saat ini hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia berkembang dengan pesat. Menurut Grindle dalam Rahman (2012) perubahan tersebut dapat disebut dengan revolusi desentralisasi. Desentralisasi secara umum dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut dapat dibagi menjadi tiga bidang yakni politik, administrasi, dan fiskal. Dengan demikian, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Menurut Sidik dalam Rahman (2012) salah satu tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Desentralisasi fiskal dibarengi dengan transfer dana ke daerah. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2018, kebijakan transfer dana ke daerah merupakan instrumen penting desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adalah penyediaan barang/layanan publik. Namun barang publik memiliki karakteristik tertentu yaitu *non-excludable* dan *non-rivalry* yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Karakteristik barang publik yang membuat barang tersebut dapat dinikmati secara bebas oleh masyarakat tanpa mengurangi kesempatan orang lain dalam mengonsumsi barang tersebut menyebabkan pihak swasta tidak ada yang bersedia untuk menyediakannya, walaupun barang publik tersebut sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk menyediakan barang-barang tersebut. Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat mengelola anggarannya untuk menyediakan barang/layanan publik yang lebih efisien dibandingkan dengan pemerintah pusat sebagai penyedia barang publik. Menurut Tiebout (1956) efisiensi penyediaan barang publik dapat dicapai jika penyediaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui preferensi masyarakatnya sehingga pengalokasiannya lebih efisien.

Pada umumnya, masing-masing daerah memiliki perbedaan kemampuan dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Perbedaan tersebut bergantung pada aspek-aspek tertentu seperti kelembagaan, jumlah penduduk, dan kapasitas fiskalnya. Dengan demikian,

efisiensi yang dicapai oleh setiap daerah dalam menggunakan anggarannya pun juga akan menjadi berbeda-beda dalam menyediakan barang/layanan publiknya. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan dalam Saraswati (2018), kualitas belanja daerah di Indonesia umumnya masih rendah, karena belanja sebagian besar dialokasikan untuk gaji pegawai. Pengelolaan keuangan daerah harus efisien sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika masing-masing daerah dapat mengalokasikan anggarannya secara efisien, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Hingga saat ini belum ada definisi baku untuk kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dalam berbagai macam aspek mulai dari tingkat kemiskinan yang rendah hingga PDB per kapita yang tinggi. Kesejahteraan masyarakat juga dapat ditentukan oleh sumber daya manusianya. Dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, terdapat dua bidang yang berperan penting yakni pendidikan dan kesehatan. Dikatakan demikian karena pendidikan dan kesehatan merupakan modal dasar yang harus dimiliki setiap manusia dalam mencapai kehidupan yang layak. Di sisi lain, untuk menciptakan tenaga kerja yang menunjang kinerja perekonomian diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih lagi, setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, setiap negara dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan berkualitas agar mampu bersaing baik di dalam maupun luar negeri. Sebagaimana yang tertera pada Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 33 tahun 2004 bahwa setiap fiskal daerah perlu melakukan pelayanan publik dasar yang harus memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisa kemampuan keuangan pemerintah daerah (kemandirian fiskal) dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal yang diukur dengan derajat desentralisasi fiskal masing-masing daerah dan melihat efisiensi penggunaan anggaran dalam menyediakan barang/layanan publik serta melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dari tahun 2012 hingga 2017 di Indonesia. Penelitian ini membagi analisis menjadi dua yakni (1) per-kabupaten/kota dan (2) per-provinsi. Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan, namun peneliti memfokuskan pada kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari pendidikan dan kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Transfer dana ke daerah memiliki peranan penting yakni sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Tujuan awal dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan aspek kemandirian daerah, namun hingga saat ini masih belum teridentifikasi apakah pada kenyataannya, dengan diberikannya transfer dana

tersebut membuat tujuan awal dalam sisi kemandirian keuangan dapat tercapai. Selain itu, efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pada program/layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan publik juga dapat mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal. Hal tersebut berperan penting dalam mempercepat pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Penelitian ini berfokus dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang dilihat melalui kualitas pembangunan manusia.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

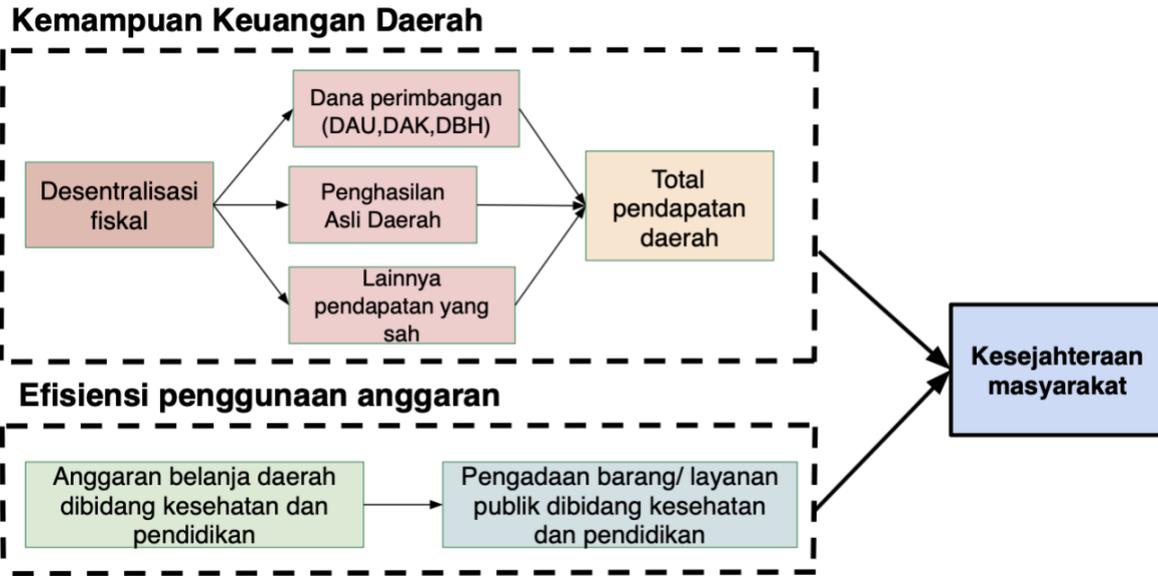
Setelah melihat latar belakang dan permasalahan yang ada, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat kemandirian fiskal pada masing masing daerah?,
2. Sejauh mana anggaran pemerintah daerah digunakan secara efisien untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan pada masing masing daerah?,
3. Bagaimana pengaruh tingkat kemandirian fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat?.

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi fiskal agar target akhir yang diharapkan yakni kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, seperti yang sudah diketahui bahwa dari awal diberlakukannya desentralisasi fiskal hingga saat ini telah terjadi banyak sekali perkembangan dalam bidang fiskal (revolusi desentralisasi). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk bidang fiskal agar kedepannya dapat berkembang menjadi lebih efisien dalam mengalokasikan anggaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi untuk para peneliti lain yang ingin memperdalam hubungan antara desentralisasi fiskal serta efisiensi penggunaan anggaran dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengamati variabel lain secara komprehensif agar memperoleh gambaran yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sejak diberlakukannya desentralisasi di Indonesia pada tahun 2001, pelimpahan kewenangan diimbangi dengan transfer dana ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang biasa disebut dengan dana perimbangan. Komponen dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan diberikan oleh pusat karena pada umumnya, setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatannya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalances*). Untuk mengatasi ketimpangan secara horizontal tersebut, pemerintah memberikan DAU dan DAK. Sementara Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan setiap daerah dalam rangka desentralisasi untuk mengatasi *vertical imbalances*. Selain dana perimbangan, komponen pendapatan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lainnya pendapatan yang sah. Ketika suatu daerah membiayai sebagian besar pengeluarannya menggunakan PAD maka daerah tersebut dapat dikatakan tidak tergantung pada pusat (mandiri) semakin mandiri suatu daerah dalam hal pembiayaan maka dapat dikatakan kemampuan daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal semakin baik. Semakin baik pelaksanaan desentralisasi fiskal maka kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat.

Berdasarkan teori federalisasi fiskal, penyediaan barang atau jasa publik tertentu akan menjadi lebih efisien apabila dilakukan desentralisasi. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintahan daerah dapat lebih baik apabila dikelola berdasarkan daerah/ letak geografisnya dan pemerintah daerah memiliki posisi yang lebih baik dalam mengenali preferensi dan kebutuhan daerah. Menurut Oates (1972), tekanan dari persaingan yurisdiksi dapat mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih inovatif dan memiliki akuntabilitas yang lebih baik bagi

warga dan penduduknya. Dengan diberlakukannya desentralisasi, efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat berpotensi untuk meningkat. Sebagai contoh, jika sistem penyediaan barang publik di suatu daerah tidak terdesentralisasi maka birokrasi akan semakin rumit sehingga menimbulkan biaya yang sebetulnya tidak diperlukan. Akan berbeda apabila dilakukan desentralisasi fiskal, birokrasi akan lebih terstruktur dan mengurangi biaya yang tidak penting sehingga dana anggaran dapat digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak. Kemudian, jika masing masing daerah efisien dalam mengalokasikan anggarannya untuk menyediakan barang publik sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah, maka kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah dalam Menyediakan Barang Publik

Peran pemerintah dalam perekonomian meliputi 3 fungsi yakni fungsi stabilisasi, fungsi distribusi, dan fungsi alokasi (Musgrave, 1959). Fungsi stabilisasi meliputi peran pemerintah dalam mempertahankan kestabilan perekonomian. Fungsi distribusi meliputi peran pemerintah dalam mempertimbangkan kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, dan struktur pasar. Sedangkan fungsi alokasi meliputi peran pemerintah dalam menyediakan barang dan layanan publik. Dalam penyediaan barang publik, peran pemerintah sangat diperlukan karena barang publik memiliki *sifat non-excludable* dan *non-rivalry*. Sifat *non-excludable* berarti tidak ada satupun pihak yang dapat menghalangi seorang atau sekelompok individu untuk mendapatkan manfaat dari barang publik tersebut sehingga setiap individu dapat memperoleh akses terhadap barang publik tersebut. Sebagai contoh, masyarakat diwajibkan membayar pajak yang kemudian sebagiannya digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan barang publik, akan tetapi yang merasakan manfaat dari barang publik tersebut tidak hanya terbatas pada masyarakat yang membayar. Masyarakat yang tidak tertib membayar pajak pun mendapatkan manfaatnya. Dengan kata lain, harga tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk menghalangi seseorang dalam mengambil manfaat atas barang publik. Sifat *non-rivalry* berarti ketika seorang individu menggunakan barang publik tertentu, kesempatan individu lainnya yang hendak menggunakan barang publik tersebut tidak akan terganggu. Dengan kata lain, setiap individu dapat menggunakan barang publik tersebut dan memperoleh manfaatnya tanpa memengaruhi kesempatan yang dimiliki serta manfaat yang didapatkan oleh individu lainnya. Kedua sifat tersebut dapat menyebabkan kegagalan pasar. Kegagalan pasar merupakan kondisi dimana mekanisme pasar sudah tidak dapat lagi mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien. Konsep kegagalan pasar pada umumnya muncul pada saat pasar gagal menawarkan